

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Kelurahan Tabona Kota Ternate

Sabaruddin B^{1*}, Much. Hidayah Marasabessy¹, Rudi Mansyur², Khaerum Nisa²,
Sadam S. Husein³, Anugrahhandini Nasir⁴

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun

²Balai Perhutanan Sosial Ambon Seksi Wilayah 2 Ternate, Kompleks Perumahan Barito Pasifik

³Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

⁴Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar

*Email: adhisabar@gmail.com

Received : 25 Mei 2026
Accepted : 22 Juni 2026
Available online : 25 Juni 2026

ABSTRACT

Community access to forest management within protected areas has been strengthened by the enactment of a policy known as social forestry. Data indicates that the achievements of the social forestry program through 2025 amount to 8.3 million hectares, or approximately 54% of the national target of 15.3 million hectares. However, behind these program achievements, there remain a number of challenges on the ground, such as limited capacity among beneficiary groups, bureaucratic obstacles, and insufficient post-approval support. The objective of this study is to determine the level of understanding, participation, as well as institutional arrangements and support following the designation of social forestry areas in the Tabona urban village. This study employed a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative descriptive methods, with research subjects selected using provocative sampling. Data analysis involved data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of the study indicate that the community's level of knowledge regarding the social forestry program is relatively good, ranging from 73.3% to 93.3% across all measured indicators. Community participation showed fairly good results, with the percentage of involvement in some indicators exceeding 73%. The community's overall perception of the benefits of the social forestry program fell into the "agree" category, with an average score of 34.2%. Institutional strength indicated a robust traditional-based internal system at 73.3%.

Keywords: Participation, perceptions, social forestry, Tabona Billage Institutions

ABSTRAK

Akses pengelolaan hutan di dalam Kawasan oleh Masyarakat mengalami penguatan dengan dilegalkannya suatu kebijakan yang bernama perhutanan sosial. Data menunjukkan bahwa capaian program perhutanan sosial hingga tahun 2025 yakni mencapai 8,3 juta atau sekitar 54% dari target Nasional yakni senilai 15,3 juta hektar. Akan tetapi dibalik capaian program tersebut masih terdapat sejumlah tantangan dilapangan seperti keterbatasan kapasitas kelompok penerima, hambatan birokrasi, hingga lemahnya pendampingan pasca persetujuan. Tujuan penelitian ini yakni ingin mengetahui tingkat pemahaman, partisipasi, serta kelembagaan dan dukungan pasca penetapan areal wilayah perhutanan sosial di kelurahan Tabona. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methode yakni pengkombinasian metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan subjek penelitiannya menggunakan Teknik provosive sampling. Analisisnya data dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat pengetahuan Masyarakat terhadap program perhutanan sosial tergolong baik, berkisar anatra 73,3 – 93,3% pada seluruh indikator yang diukur. Partisipasi masyarkat menunjukkan capaian yang cukup baik dengan persentase keterlibatan pada Sebagian indikator diatas 73%. Presepsi Masyarakat terhadap manfaat program perhutanan sosial secara keseluruhan berada pada kategori setuju dengan nilai rata-rata skor 34,2%. Kelembagaan menunjukan kuatnya sistem internal berbasis adat sebesar 73,3%.

Kata kunci: Partisipasi, perhutanan sosial, persepsi, kelembagaan Kelurahan Tabona

PENDAHULUAN

Akses pengelolaan hutan di dalam Kawasan oleh Masyarakat mengalami penguatan dengan dilegalkannya suatu kebijakan yang Bernama perhutanan sosial (Lawasi, 2022). Berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 Perhutanan sosial merupakan model pengelolaan hutan Lestari yang dilaksanakan di dalam Kawasan hutan negara, hutan hak, dan hutan adat yang pengelolaanya diberikan kepada Masyarakat setempat atau Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraanya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Syofiarti, 2023). Dengan demikian implementasi pengelolaan perhutanan sosial memuat 5 model skema yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (Julia Aura Zakia, 2024).

Data menunjukkan bahwa capaian program perhutanan sosial hingga tahun 2025 yakni mencapai 8,3 juta atau sekitar 54% dari target Nasional yakni senilai 15,3 juta hektar (Mariaty, 2025). Akan tetapi dibalik capaian program tersebut masih terdapat sejumlah tantangan dilapangan. Tantangan tersebut seperti keterbatasan kapasitas kelompok penerima, hambatan birokrasi, hingga lemahnya pendampingan pasca persetujuan (Pambudi, 2023).

Disisi lain, Program Perhutanan Sosial tidak hanya menyentuh pada aspek ekonomi, namun berimplikasi terhadap capaian Pembangunan berkelanjutan (SDG's), termasuk dalam aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, penyerapan tenaga kerja, dan penanganan perubahan iklim (Khalwani, 2025). Sehingga program perhutanan sosial diposisikan sebagai instrument strategis yang fokusnya tidak hanya pada sektor kehutanan melainkan Pembangunan nasional secara keseluruhan (Verawati, 2025).

Pada cakupan regional, implikasi perhutanan sosial di Provinsi Maluku Utara masih menghadapi kompleksitas dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Ancaman industri ekstraktif yang masif, khususnya perusahaan-perusahaan nikel di pulau Halmahera berperan serta terhadap kondisi ekosistem hutan secara signifikan. Berdasarkan data global Forest Watch Pulau Halmahera mengalami laju deforestasi sekitar 228 ribu hektar selama periode 2001 – 2025 (Watch, 2026). Akibatnya

berdampak terhadap karakteristik biofisik ekosistem hutan di pulau Halmahera pada umumnya dan Maluku Utara pada khususnya. Hal itu juga sebagai penanda bahwa kebijakan perhutanan sosial tanpa disertai dengan pemberdayaan dan pendampingan Masyarakat sekitar hutan berpotensi tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut seperti yang terjadi pada Hutan Lindung Gunung Hamiding Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dimana, mereka mengungkapkan kondisi faktual berdasarkan observasi lapangan bahwa penetapan izin tidak otomatis menjamin keberhasilan program perhutanan sosial tanpa disertai dengan pemberdayaan dan pendampingan Masyarakat sekitar hutan (Kailola, 2024).

Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan, secara administratif berada pada wilayah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Kelurahan ini memiliki Kawasan hutan dengan potensi sumber daya alam yang besar. Secara historis, masyarakatnya bergantung penuh terhadap Kawasan hutan yang dimilikinya. Kebergantungan tersebut, baik berupa pemenuhan kebutuhan subsinten maupun sebagai sumber pendapatan tambahan. Meskipun demikian sejauh ini belum ada kajian akademis yang secara khusus menganalisis dinamika perhutanan sosial pada wilayah ini, baik mengenai tingkat pemahaman, partisipasi, serta kelembagaan dan dukungan pasca penetapan areal wilayah perhutanan sosial. Guna mendukung kekosongan kajian akademik, penelitian fokus dilakukan di wilayah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* (metode campuran) yakni pengkombinasian metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk penggambaran, penjelasan, dan pemahaman fenomena sosial secara lebih mendalam berdasarkan prespektif subject yang diteliti (Waruwu, 2024), adapun kuantitatif untuk menggambarkan kecenderungan numerik, menjelaskan alasan, konteks, dan makna yang mendasari setiap temuan di lapangan (Ratar, 2025)

Pendekatan ini dipilih karena didasarkan atas pertimbangan metodologis mengingat bahwa fokus kami terhadap pemahaman mendalam bukan pengukuran statistik, dapat

menyimpulkan kompleksitas dan pengalaman Masyarakat di lapangan, mendukung dalam konteks lokal terhadap interpretasi data, dan fleksibel dalam eksplorasi isu yang belum banyak di teliti (Supandi, 2025).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Penelitian berlangsung selama tiga bulan, termasuk persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil penelitian. Fokus utama lokasi penelitian yakni area Kawasan hutan pada perhutanan sosial di Kelurahan Tabona.

Subjek Penelitian dan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas dimana peneliti dengan sengaja memilih individu dan kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap paling relevan dan mendukung tujuan penelitian (Mardhiyah, 2025). Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak semua populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan informan atau subjek penelitian.

Guna mendukung penelitian ini, kami juga mengintegrasikan teknik *snowball sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dilakukan dengan cara meminta informan awal (*Key Informants*) merekomendasikan atau menunjuk informan lain yang memenuhi kriteria penelitian (Suriani, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berlangsung secara berantai sehingga jumlah sampel dapat bertambah. Berikut adalah kelompok informan yang ditetapkan dalam penelitian ini:

1. Masyarakat pengguna hutan, yaitu masyarakat yang aktif memanfaatkan/ bergantung pada kawasan hutan di Kelurahan Tabona
2. Tokoh Masyarakat /Tokoh adat, merupakan pihak yang memiliki otoritas dan pengetahuan tentang hutan adat/ tradisi lokal
3. Balai Perhutanan Sosial Wilayah II Ternate, yaitu pihak yang terlibat dalam fasilitasi program perhutanan sosial di wilayah penelitian
4. KPH Ternate Tidore, adalah pihak yang terlibat dalam fasilitasi program perhutanan sosial di wilayah ini

5. Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu anggota aktif yang terdaftar dalam program Perhutanan Sosial di wilayah ini

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik sebagai berikut::

- a. Wawancara Mendalam (*in-depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yang didapatkan melalui percakapan secara langsung dan fleksibel antara peneliti dan informan untuk memperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai pengalaman, persepsi, pandangan, motivasi, maupun makna terhadap suatu fenomena yang diteliti (Arianto, 2024). Setiap wawancara yang dilakukan direkam dengan izin informan dan kemudian ditranskripsikan.

- d. Observasi Partisipatif

Observasi Partisipatif merupakan kegiatan pengamatan langsung di lapangan terhadap kondisi kawasan hutan, aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hutan, serta kegiatan kelembagaan yang berkaitan dengan perhutanan sosial (Pratiwi, 2024). Setiap observasi yang dilakukan akan dicatat pada (*field notes*) kemudian ditranskripsikan secara sistematis.

- d. Studi Dokumen

Pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dan mendukung seperti SK Izin Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Laporan Kegiatan KTH, Peraturan terkait Hutan, dan Peta Kawasan Hutan.

- d. Kuisisioner Pendukung

Kuisisioner digunakan sebagai instrument pendukung dalam mendapatkan data dasar dari responden yang lebih mendalam. Kuisisioner bersifat semi terbuka dan digunakan untuk memperkuat data kualitatif yang diperoleh dari wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana (Irfan, 2023) yang terdiri dari :

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*), yaitu pengumpulan data secara simultan dari berbagai sumber
- b. Kondensasi Data (*Data Condensation*), merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah

- c. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu teknik penyajian data dengan model teks naratif, matriks, tabel, atau bagan untuk memudahkan penarikan Kesimpulan
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu Penarikan kesimpulan dari hasil data yang telah didapatkan kemudian dilakukan verifikasi kembali melalui pengecekan ulang.

Validitas Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik validitas agar data yang dihasilkan terjamin keabsahannya, yakni:

- a. Triangulasi sumber, merupakan proses mengecek ulang data yang sama dari berbagai sumber infroman yang berbeda. Pengecekan dilakukan pada saat wawancara berlangsung untuk mengkonfirmasi data yang didapatkan dari informan sebelumnya.
- b. Triangulasi metode, yaitu dengan mengecek konsistensi infromasi data dari para infroman-informan. Kegiatan ini bertujuan agar tidak terjadi bias data antar infroman.
- c. Pengamatan Lapangan, yaitu dengan cara peneliti berada di lapangan cukup lama untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan data lapangan yang mendalam

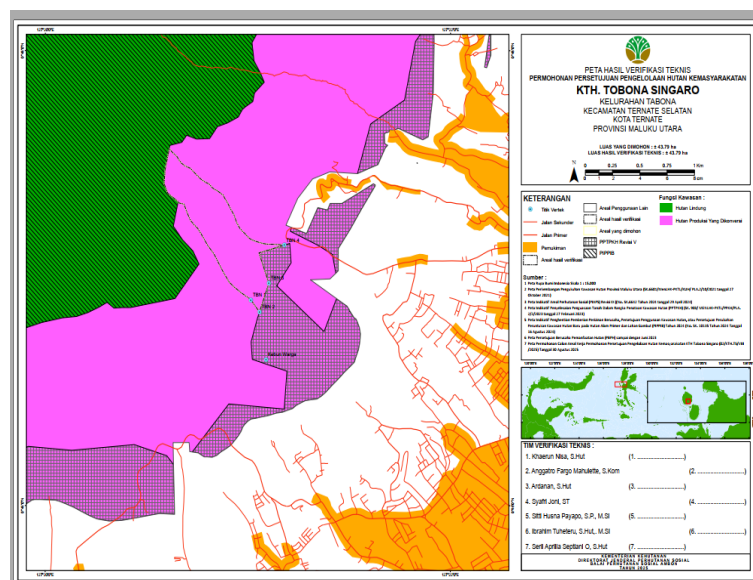
HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pengelolaan Hutan di Kelurahan Tabona

Sejarah pengelolaan hutan di Kelurahan Tabona tidak dapat dipisahkan dari kearifan

Masyarakat Kerajaan masa lalu sebelum kemerdekaan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diketahui bahwa sistem pengelolaan hutan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Seorang tokoh adat mengungkapkan: “Sebelum kesultanan ternate berada di wilayah pulau ternate, yang mendiami pulau ini lebih dahulu yakni empat momole (empat kerajaan), yaitu Tabona, Tobelevu, Tubo, dan Tobanga. Momole tabona, menjadi penentu kebijakan dalam penyelenggaran momole. Tabona sendiri berasal dari kata baru dengar”. Aktifitas yang diusahakan oleh Masyarakat sejak dahulu yakni berkebun pala dengan sistem marong (berkumpul) (A, 2026). Pernyataan tersebut menunjukan bahwa ada pembagian zona dari empat kerajaan yang sistematis dalam pengelolaan lahan dengan menerapkan sistem yang demokratis dalam pembagiannya. Selain itu. Usaha pengelolaan lahan ini modelnya masih tradisional dengan cara gotong royong.

Pada tahun 2025, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor. BA.139/BPS-4/BPS-TU/PS.0.1/09/2025, Kementerian Kehutanan melalui Balai PS Ambon (Balai Pengelolaan Sosial) memberikan akses legal untuk mengelola Kawasan hutan di kelurahan tabona. Adapun nama Kelompok Tani Hutannya yakni Tobona Sigaro. Selanjutnya anggota kelompok tani hutannya berjumlah 17 orang. Peta hasil Verifikasi Teknis Kelompok Tani Hutan Tobona Sigaro dapat dilihat pada Gambar 1



Tabel 1. Hasil pengukuran Tingkat pengetahuan Masyarakat tentang perhutanan sosial

No	Indikator Pertanyaan	Ya %	Tidak %
1	Mengetahui istilah perhutanan sosial	73,3	26,7
2	Mengetahui adanya program perhutanan sosial di kelurahan Tabona	73,3	26,7
3	Mengetahui Konsep Hutan Kemasyarakatan (HKm)	80	20
4	Pernah menerima sosialisasi dari pemerintah / LSM	73,3	26,7
5	Mengetahui hak Masyarakat memperoleh izin pengelolaan hutan	93,3	6,7



Gambar 2. Dokumentasi penelitian bersama masyarakat dan anggota Kelompok Tani Hutan Tabona Sigaro di Kelurahan Tabona dan Kawasan HKm

Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang perhutanan sosial diukur melalui lima indikator pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman istilah, keberadaan program di wilayah setempat, pengetahuan tentang skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), sosialisasi yang pernah diterima serta pemahaman atas hak Masyarakat dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner terhadap 15 responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pemahaman Masyarakat terkait perhutanan sosial menunjukan jawaban “ya” dominan tinggi, berkisar antara 73,3% - 93,3%, sementara persentase jawaban “Tidak” relatif kecil berada pada rentang 6,7% - 26,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman Masyarakat terhadap perhutanan sosial di kelurahan tabona tergolong baik. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Maria Ulfa, 2022) dimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap hutan Desa berpengaruh nyata terhadap model hutan yang dikelolanya.

Pada pertanyaan pertama dan kedua, yakni pengetahuan terhadap istilah perhutanan sosial dan keberadaan program memperoleh angka yang sama yakni 73,3%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya hubungan antara pemahaman konseptual Masyarakat

dengan kesadaran mereka terhadap implikasi program di wilayah mereka berada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengenalan istilah perhutanan sosial selaras dengan informasi keberadaan program tersebut secara lokal. Temuan ini sejalan dengan (Dwi Maryania, 2025) dimana semakin tinggi pemahaman konseptual semakin kecil resiko kesalapahaman program di lapangan.

Indikator ketiga, mengenai pemahaman terhadap konsep hutan kemasyarakatan (HKm) (Tabel 1), menunjukan persentase yang lebih tinggi yakni sekitar 80%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa informasi terkait legalitas pengelolaan Kawasan hutan melalui skema HKm di Kelurahan Tabona telah tersosialisasi dengan baik. Sehingga istilah tersebut lebih familiar di kalangan Masyarakat khususnya anggota Kelompok Tani Hutan yang terlibat langsung proses pengusulan dan verifikasi Izin. Hal itu sejalan dengan (Arman Maiwa, 2023) tanpa adanya keterlibatan pendamping atau stakeholder yang terkait pemahaman Kelompok Tani Hutan terhadap HKm tergolong rendah.

Indikator keempat terkait sosialisasi formal baik dari pemerintah maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) memperoleh persentase sebesar 73,3%, setara dengan dua indikator sebelumnya (Tabel 1). Hal tersebut mengindikasikan bahawa masih ada celah dan

ruang terkait jangkauan diseminasi informasi program perhutanan sosial. Hal ini perlu menjadi perhatian Bersama khususnya pemangku kebijakan terkait.

Indikator kelima memiliki persentasi yang paling tinggi dibanding indikator lainnya yakni sekitar 93,3% terkait perolehan izin pengelolaan hutan (Tabel 1). Hal tersebut mengindikasikan tingginya kesadaran Masyarakat terkait aspek hak. Ini merupakan modal dasar bagi Masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan secara legal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat pengetahuan Masyarakat terkait perhutanan sosial sudah berada pada kategori tinggi. Akan tetapi, masih

ada sebahagian Masyarakat yang belum memahami program ini. Sehingga perlu penguatan strategi diseminasi informasi yang lebih merata baik oleh pemerintah maupun LSM.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan di kelurahan tabona diukur melalui enam indikator yang mencakup keikutsertaan dalam pertemuan, kegiatan teknis di lapangan, keanggotaan kelompok tani, perencanaan penggunaan lahan, hingga pelaporan pelanggaran. Hasil rekapitulasi terhadap 15 responden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengukuran partisipasi Masyarakat

No	Indikator Pertanyaan	Ya %	Tidak %
1	Menghadiri Pertemuan/ rapat pengelolaan hutan	80%	20%
2	Terlibat dalam kegiatan penanaman pohon	80%	20%
3	Terlibat dalam penjagaan / pengawasan hutan	73,33%	26,67%
4	Menjadi anggota kelompok tani hutan (KTH)	60%	40%
5	Terlibat dalam perencanaan penggunaan lahan hutan	80%	20%
6	Melaporkan jika ada pelanggaran (penebangan liar)	86,67%	13,33%

Tabel 2 menunjukan bahwa secara umum tingkat partisipasi masyarakat menunjukan jawaban “ya” dominan tinggi, berkisar antara 60% - 86,67%, sementara persentase jawaban “Tidak” relatif kecil berada pada rentang 6,7% - 26,7%. Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum Tingkat partisipasi Masyarakat di Kelurahan Tabona dalam pengelolaan hutan tergolong tinggi, dengan persentase jawaban “ya” berada pada rentang 60% - 86,67%. Hal tersebut menunjukan bahwa Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat program perhutana sosial, akan tetapi turut terlibat aktif dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan. Hal itu sesuai dengan (Yumantoko, 2024) dimana program perhutanan sosial mendorong keterlibatan penuh masyarakat Kelompok Tani Hutan.

Persentase tertinggi yakni indikator pelaporan pelanggaran seperti penebangan liar sebesar 86,7%. Hal tersebut menunjukan kesadaran Masyarakat dalam aspek kepemilikan “sense of belonging” terhadap Kawasan hutan. Hal tersebut sejalan dengan (Haudec Herrawan, 2022) program perhutanan sosial dapat membangun “collective action” dalam pengelolaan hutan negara.

Persepsi dan Manfaat Program Perhutanan Sosial

Persepsi Masyarakat terhadap program perhutanan sosial diukur dengan menggunakan skala likert dengan 8 pernyataan yang mencakup manfaat, pendapatan, kelestarian, lingkungan, pengakuan hak, dukungan pengambilan Keputusan, kepuasan program, dan potensi konflik. Pengkategorian presepsi dilakukan berdasarkan perhitungan interval kelas dengan rumus :

$$I = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}} = \frac{40}{8} = 5$$

Adapun kategori interval yang digunakan tertera pada Tabel 3, sementara distribusi frekuensi kategori presepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Kategori interval

Inteval	Kategori
24,0 – 27,2	Sangat tidak setuju
27,3 – 30,4	Tidak setuju
30,5 – 33,6	Netral
33,7 – 36,8	Setuju
36,9 – 40,0	Sangat Setuju

Tabel 4. Hasil presepsi Masyarakat

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat tidak setuju	2	0%
Tidak setuju	9	6,7%
Netral	3	20,0%
setuju	1	60,0%
Sangat Setuju	0	13,3%
Total	15	100,0%

Tabel 4 menampilkan hasil rekapitulasi yang menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 9 orang (60%) berada pada kategori setuju, diikuti oleh kategori netral sebanyak 3 orang (20%), sangat setuju sebanyak 2 orang (13,3%), dan tidak setuju sebanyak 1 orang (6,7%). Sementara untuk kategori sangat tidak setuju tidak menunjukkan adanya responden. Nilai rata-rata skor total keseluruhan responden adalah 34,2 yang berada pada interval 33,7-36,8 (kategori setuju). Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di Kelurahan Tabona memiliki presepsi yang positif terhadap keberadaan dan manfaat program perhutanan sosial. Dominasi kategori setuju (60%) menunjukkan bahwa Sebagian besar Masyarakat merasakan implikasi nyata dari program kegiatan ini. Baik dari sisi pengakuan hak pengelolaan hutan, manfaat terhadap kelestarian lingkungan, maupun kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan (Ramli Ramadhan, 2024) dimana implementasi perhutanan sosial memberikan jaminan tenurial yang lebih baik kepada masyarakat.

Responden yang berada pada kategori setuju berjumlah dua orang dengan skor tertinggi 40 dan 37. Responden tersebut

merupakan anggota aktif yang terlibat langsung dalam pengelolaan kelompok tani hutan Tabona Sigaro, sehingga mereka merasakan implikasi dari program kegiatan perhutanan sosial secara menyeluruh.

Responden yang berada pada kategori tidak setuju dengan skor 28 dan satu responden pada kategori sangat tidak setuju menunjukan bahwa masih adanya Sebagian kecil Masyarakat yang belum merasakan manfaat program secara optimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan informasi yang mereka terima, minimnya keterlibatan dalam kegiatan kelompok, serta belum meratanya distribusi manfaat.

Secara keseluruhan nilai rata-rata presepsi Masyarakat sebesar 34,2 berada pada kategori setuju merupakan capaian yang baik dan menggembirakan, mengingat program HKm di Kelurahan Tabona masih tergolong baru secara legalitas formal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kekuatan sosial dan kultural yang kuat berupa tradisi pengelolaan hutan sejak dahulu telah menjadi modal utama yang memudahkan penerimaan Masyarakat terhadap program perhutanan sosial berbasis legalitas formal.

Kelembagaan dan Dukungan

Aspek kelembagaan dan dukungan dalam pengelolaan hutan di kelurahan tabona melalui lima indikator pertanyaan yang berkaitan dengan keanggotaan kelompok tani hutan (KTH), keberadaan peraturan adat lokal, bantuan teknis dari pemerintah serta keterlibatan Lembaga dalam hal pendampingan. Hasil rekapitulasi kuisisioner terhadap 15 responden disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil kelembagaan dan dukungan

No	Indikator	Persentase	
		Ya	Tidak
1	KTH aktif dikelurahan Tabona	80,0	20,0
2	Keterlibatan dalam Kelompok	60,0	40,0
3	Peraturan adat / lokal pengelolaan hutan	73,3	26,7
4	Bantuan teknis pelatihan dari pemerintah	0	100,0
5	Ada LSM/organisasi pendamping	0	100,0

Tabel 5 menunjukan bahwa ada hubungan kontradiktif dalam kelembagaan pengelolaan hutan di Kelurahan Tabona. Kekuatan dimensi dalam kelembagaan internal masyarakat yang berbanding terbalik dengan ketiadaan dukungan eksternal dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Pada indikator pertama sebanyak 80% responden mengakui keberadaan KTH yang

aktif beroperasi di Kelurahan Tabona (Tabel 5). Tingginya pengakuan ini mengindikasikan bahwa struktur kelembagaan formal pengelolaan hutan kemasyarakatan telah cukup dikenal dan diakui oleh Sebagian Masyarakat. Akan tetapi masih ada sekitar 20% responden yang tidak mengaku aktif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya kesenjangan informasi dan komunikasi

kelembagaan antara warga, terutama bagi mereka yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok.

Sebanyak 60% responden menyatakan dirinya terlibat sebagai anggota aktif (Tabel 5). Adanya kondisi seperti ini mengimplikasikan bahwa tidak seluruh warga yang mengetahui KTH secara otomatis terintegrasi kedalam struktur kelompok. Oleh karena itu diperlukan dorongan sistematis dari pengurus kelompok untuk memperluas jangkauan rekrutmentnya agar programnya dapat dirasakan secara merata. Selisih 20% responden antara pengakuan terhadap keberadaan KTH dengan keanggotaan aktual ini menunjukkan adanya jarak eksklusivitas keanggotaan.

Indikator peraturan adat / lokal pengelolaan hutan menunjukkan bahwa 73,3% responden menyatakan adanya peraturan adat atau lokal yang mengatur pengelolaan hutan diwilayah mereka (Tabel 5). Hal tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam konteks pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagai pengontrol internal yang telah teinternalisasi. Mengacu pada konteks historis kelurahan tabona yang memiliki tradisi pengelolaan hutan berbasis sistem empat momole sejak masa kesultanan ternate. Hal ini menunjukan pranata sosial yang masih hidup dan relevan sebagai landasan tata Kelola hutan secara partisipatif dan keberlanjutan.

Temuan yang paling krusial yakni pada indikator keempat dan kelima dimana seluruh responden 100% menyatakan belum pernah ada bantuan teknis maupun pelatihan dari pemerintah maupun LSM atau organisasi untuk pengelolaan hutan (Tabel 5). Hal ini menunjukan bahwa proses pengurusan HKm telah berhasil diselesaikan oleh Kelompok Tani Hutan Tabona Sigaro secara mandiri.

KESIMPULAN

Secara umum beberapa temuan penting dilapangan menunjukkan Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap program pengelolaan hutan di Kelurahan Tabona menunjukan bahwa:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program perhutanan sosial tergolong baik, berkisar 73,3 – 93,3% pada seluruh indikator yang diukur. Hal tersebut menunjukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap akses legal pengelolaan hutan terbentuk dengan baik,

walaupun sosialisasi belum menjangkau Masyarakat secara keseluruhan.

2. Partisipasi masyarakat menunjukkan capaian yang cukup baik dengan persentase keterlibatan pada sebagian indikator diatas 73%. Hal tersebut menunjukan bahwa Tingkat partisipasi Masyarakat tidak selamanya bersifat formal. Akan tetapi ada nilai-nilai kearifan lokal berupa gotong royong yang telah berakar sejak dahulu kala.
3. Persepsi masyarakat terhadap manfaat program perhutanan sosial secara keseluruhan berada pada kategori setuju dengan nilai rata-rata skor 34,2% dari skala maksimum 40%, menunjukan bahwa program perhutanan sosial dirasakan membawa dampak positif.
4. Aspek kelembagaan menunjukkan kuatnya sistem kelembagaan internal berbasis adat sebesar 73,3%, ini dapat berarti modal sosial masyarakat Tabona lebih kuat dibandingkan pengaruh eksternal kelembagaan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa partisipasi Masyarakat pengelolaan hutan di Kelurahan Tabona memiliki fondasi sosial, kultural, serta kelembagaan yang kuat guna mendukung keberlanjutan program perhutanan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada masyarakat di Kelurahan Tabona, KPH Ternate-Tidore, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, serta Balai Perhutanan Sosial Ambon Seksi Wilayah 2 Ternate (BPSKL WIL II Ternate) atas kolaborasinya sehingga jurnal penelitian ini dapat kami selesaikan dengan semestinya. Ucapan terima kasih secara khusus kepada teman-teman anggota Kelompok Tani Hutan Tabona Sigaro serta Ibu Lurah Tabona yang memberikan kontribusi waktu dan informasi yang kami perlukan dalam penyelesaian artikel penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A, R. (2026). *Wawancara Sejarah Pengelolaan Hutan (Wawancara Personal)*.
Arman Maiwa, H. A. (2023). *Pembinaan Kelompok Tani Sintuvu Roso Dalam*

- Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 164-171.
- Bambang Arianto, S. M. (2024). *Teknik Wawancara dalam Metoda Penelitian Kualitatif*. Balikpapan: Borneo Novelty Publishing.
- Supandi, M. H. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jawa Timur: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah (Penerbit HN Publishing).
- Dwi Maryania, G. S. (2025). Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Maju Bersama Desa Air Tenam Kabupaten Bengkulu Selatan. *NATURALIS –Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 170-179.
- Haudec Herrawan, N. S. (2022). Commoning the State Forest: Crafting Commons through an Indonesian Social Forestry Program. *Forest and Society*, 20-39.
- Julia Aura Zakia, G. Z. (2024). Peluang Dan Tantangan Program Perhutanan Sosial di Wilayah KHDPK (Studi Kasus di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 77-86.
- Kailola, J. (2024). Partisipasi Masyarakat Pasca Penetapan Program Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Hamiding Di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*, 289-299.
- Khalwani, K. M. (2025). Kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap Pengurangan Ketimpangan di Indonesia: Tinjauan Literatur dan Analisis SDGs Goal 10(Reducing Inequalities). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5504-5517.
- Lawasi, M. A. (2022). Mengkonstruksi Akses, Pendampingan, Dan Inovasi Sebagai Formula Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial. *Journal Ilmu Administrasi Negara*, 50-65.
- M. Aldi Irfan, F. U. (2023). Character Education Management With Whole School Development Approach. *Journal Of Social Science And Economics*, 18-28.
- Mardhiyah, N. A. (2025). Populasi dan Sampel dalam Penelitian Pendidikan: Memahami Perbedaan, Implikasi, dan Strategi Pemilihan yang Tepat. *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 208-218.
- Maria Ulfa, A. C. (2022). 178 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hutan Desa Pematang Rahim Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Hutan Lestari*, 178-185.
- Mariaty, D. P. (2025). Analisis Implementasi Pola Kemitraan Kehutanan dalam Skema Perhutanan Sosial (PS) di Kalimantan Tengah: Studi Kasus Lanskap Rungan. *Jurnal Daun*, 101-110.
- Ratar, A. M. (2025). *Metode Penelitian Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Methode*. Kota Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Suriani, R. J. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 24-36.
- Pambudi, A. S. (2023). Capaian, Tantangan, Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 74-94.
- Putri Adinda Pratiwi, F. M. (2024). Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 133-149.
- Ramli Ramadhan, A. N. (2024). Enhancing Tenure Security: A Case Study of the Social Forestry Scheme in the State Forestry Corporation, Malang District, East Java. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 29-39.
- Syofiarti, T. F. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat. *Swara Justisia*, 444-461.
- Verawati, O. B. (2025). Perhutanan Sosial Sebagai Instrumen Peningkatan Ekonomi Lokal: Telaah Implementasi Di Kabupaten Mamasa. *Journal Publicuho*, 1675-1686.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 198-211.
- Watch, G. F. (2026). *Forest Change Statistics*. www.globalforestwatch.org.
- Yumantoko, S. R. (2024). Partisipasi Komunitas dalam Konservasi Lingkungan(Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 408-420.